



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan target dan indikator kinerja dengan dinamika pembangunan serta menciptakan keselarasan program RKPD dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dan Perubahan RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025, maka perlu dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN
2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang

mengindikasikan ...

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kota, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
17. Kegiatan ...

17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II JENIS IKU

Pasal 2

- (1) IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kota; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PEMILIHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU Pemerintah Kota dengan IKU Perangkat Daerah harus selaras dan sinkron.

(2) IKU ...

- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. IKU Pemerintah Kota paling sedikit merupakan indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling sedikit merupakan indikator keluaran (*output*).

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan

meneliti ...

meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13-A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2019
 TENTANG
 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 – 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi Waras : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat			
1.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, promosi dan preventif kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani	1. Angka Harapan Hidup (tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan masyarakat. • Formulasi Pengukuran : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pembangunan kota Surakarta ramah lingkungan berada pada level mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : IKLH = (IPA (Indeks Pencemaran Air) x 30%) + (IPU (Indeks Pencemaran Udara) x 30%) + (ITH (Indeks Tutupan Hutan) x 40%) • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Lingkungan Hidup
Misi Wasis: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah			
3.	Terwujudnya Pendidikan untuk semua yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan	1. Rata-rata lama sekolah (tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan kota Surakarta meningkatkan akses pendidikan masyarakat untuk menyelesaikan jenjang tahun pendidikan, sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia • Formulasi Pengukuran : Jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). (Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan) • Tipe Penghitungan: Kumulatif

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : BPS • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Pendidikan • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan kota Surakarta, termasuk sarana prasarana mampu menyediakan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sebagai bagian dari indikator Indeks Pembangunan Manusia • Formulasi Pengukuran : $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p> HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah Penduduk usia i pada tahun t i = Usia (a, a+1, ... n) FX = Faktor koreksi pesantren </p> • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>BPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Pendidikan
4.	Terwujudnya masyarakat yang cakap mengupayakan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai seni budaya, serta prestasi pemuda dan olah raga	<p>1. Tingkat aktualisasi pelestarian seni dan budaya</p> <p>2. Tingkat Prestasi Pemuda dan Olahraga</p>	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program pembangunan seni budaya berhasil menjaga kelestarian kekayaan daerah, mendukung daya saing daerah Formulasi Pengukuran : Rata-rata kinerja fasilitasi seni, cakupan gelar seni, cakupan organisasi seni Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Dinas Kebudayaan Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Kebudayaan Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran peningkatan mutu pengembangan pemuda dan olahraga menghasilkan SDM kota yang berdaya saing. Formulasi Pengukuran : Rata-rata kinerja prestasi atlet dan prestasi pemuda Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Misi Wareg : Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani			
5.	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohani	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pembangunan di kota Surakarta menghasilkan kesetaraan dan keadilan akses diantara kelompok berbasis gender, diukur dari komponen indikator utama pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi (pengeluaran per kapita) mengingat IPG kota Surakarta masih perlu ditingkatkan • Formulasi Pengukuran : IPG diukur dengan cara membandingkan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata Lama Sekolah dan rata-rata pendapatan antara laki-laki dan perempuan atau, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dipilah untuk skor laki-laki dan perempuan • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : BPS • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Pemberdayaan Perempuan,

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Tingkat Kemiskinan	<p>Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan untuk mewujudkan sasaran strategis kesejahteraan masyarakat. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah penduduk miskin}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : BPS dan Dinas Sosial • Perangkat Daerah Penanggung jawab : <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (Setda) b. Didukung oleh semua perangkat daerah, terutama: <ul style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Daerah pemegang urusan yang berdampak langsung pada produksi dan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja: <ul style="list-style-type: none"> a) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, b) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, c) Dinas Koperasi, Usaha

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Pendapatan per kapita (rupiah)	<p>Kecil dan Menengah</p> <p>2) Perangkat Daerah pemegang urusan penunjang perencanaan pembangunan (Bappeda)</p> <p>3) Perangkat Daerah pengelola data kemiskinan diampu oleh Dinas Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan lintas sektor yang dilakukan Perangkat Daerah di kota Surakarta memberikan pengaruh pada peningkatan pendapatan perkapita, sehingga mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{PDRB tahun } t}{\text{jumlah penduduk tahun } t} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : BPS • Perangkat Daerah Penanggungjawab : <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (Sekretariat Daerah) b. didukung oleh" <ul style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Daerah pemegang urusan yang berdampak langsung pada produksi dan pendapatan

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>4. Pengeluaran per kapita (rupiah)</p>	<p>masyarakat dan penyerapan tenaga kerja:</p> <p>a) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan,</p> <p>b) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian,</p> <p>c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)</p> <p>2) Perangkat Daerah pemegang urusan penelitian dan pengembangan (Bappedda)</p> <p>3) Perangkat Daerah pengampu urusan penunjang perencanaan pembangunan (Bappedda)</p> <p>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor yang dilakukan Perangkat Daerah di kota Surakarta memberikan pengaruh pada peningkatan produksi, pendapatan perkapita dan ketersediaan kebutuhan masyarakat, sehingga mempengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat, dan pada gilirannya mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota</p> <p>• Formulasi Pengukuran :</p> $Y_t = \frac{Y'_t}{IHK_{(t, \text{tahun})}} \times 100$ <p>* Y_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan</p> <p>* Y'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>IHK (t, tahun dasar) = IHK tahun t (contoh: tahun dasar 2012)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : BPS • Perangkat Daerah Penanggungjawab : <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (Sekretariat Daerah) b. Didukung oleh" <ul style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Daerah pemegang urusan yang berdampak langsung pada produktivitas, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan komoditas sehingga meningkatkan kemampuan pengeluaran: <ul style="list-style-type: none"> a) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, b) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2) Perangkat Daerah pemegang urusan penunjang perencanaan pembangunan (Bappeda)
6.	Terwujudnya perekonomian	1. Pertumbuhan ekonomi/	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
	kota yang maju, kuat dan mandiri	PDRB (%)	<p>mengevaluasi sejauhmana pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektor di kota Surakarta berhasil menumbuhkan kekuatan ekonomi kota. PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang memotret keadaan makro ekonomi suatu daerah, sehingga membantu pengambil kebijakan melakukan perencanaan dan evaluasi terutama untuk perumusan program pembangunan bidang ekonomi.</p> <p>• Formulasi Pengukuran :</p> $= \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PDB/PDRBt : PDB/PDRB tahun tertentu</p> <p>PDB/PDRBt-1 : PDB/PDRB thn sebelumnya</p> <p>• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif</p> <p>• Sumber Data : BPS</p> <p>• Perangkat Daerah Penanggung jawab :</p> <p>a. Perangkat Daerah fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (Sekretariat Daerah)</p> <p>b. Didukung oleh :</p> <p>Perangkat Daerah pemegang urusan yang berdampak langsung pada produktivitas, pendapatan masyarakat, dan</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>pengeluaran masyarakat, sehingga berpengaruh pada nilai PDRB:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 4) Dinas Kebudayaan, 5) Dinas Pariwisata, 6) Dinas Perhubungan, 7) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, 8) Perangkat Daerah pemegang urusan penunjang perencanaan pembangunan (Bappeda)
		2. Tingkat inflasi (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauhmana kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Hal ini penting dikendalikan agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. • Formulasi Pengukuran : $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Keterangan :</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n= tahun ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : BPS • Perangkat Daerah Penanggungjawab : <ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (Sekretariat Daerah) b. Didukung oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Daerah pemegang urusan yang berdampak langsung penghasil, penyedia dan distribusi barang (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan) 2) Perangkat Daerah Pemegang urusan perencanaan (Bappeda)
Misi Mapan : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif dan melayani			
7.	Terwujudnya	1. Rata rata nilai	• Alasan Pemilihan Indikator :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
	reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis <i>E-Government</i>	survey kepuasan masyarakat	<p>Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dinilai memuaskan pengguna sehingga mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju dan berdaya saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah nilai survey kepuasan masyarakat PD Kota Surakarta yang melakukan survey}}{\text{jumlah PD Kota Surakarta yang melakukan survey}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Surakarta • Perangkat Daerah Penanggungjawab : <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat Daerah fungsi penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif (Sekretariat Daerah Kota Surakarta) b. Didukung oleh: Semua Perangkat Daerah
8.	Meningkatnya kinerja pembangunan daerah berwawasan kependudukan dan	1. Persentase capaian kinerja sasaran pembangunan : <ul style="list-style-type: none"> • RPJMD • RKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek capaian sasaran pembangunan

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
	keberlanjutan lingkungan		<p>sesuai dengan target yang telah ditentukan, untuk mendukung pencapaian unsur visi kota maju dan mencapai masyarakat sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulasi Pengukuran : $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ $x_i = \frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun - n}}{\text{Target Kinerja RPJMD Tahun - n}}$ Tipe Penghitungan: Non Kumulatif Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Perangkat Daerah Penanggungjawab : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
9.	Meningkatnya ketertiban, keamanan, penegakan hukum dan hak asasi manusia serta harmoni sosial masyarakat	1. Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan lintas sektor berhasil mengendalikan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) untuk menjaga kondusivitas daerah dalam rangka mendukung peningkatan daya saing kota

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta
Misi Papan : Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, tempat untuk berusaha dan berkreasi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya			
10.	Tersedianya permukiman dan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, manusiawi, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan siaga bencana	1. Infrastuktur Kota dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan lintas sektor urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur kota untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{(\% \text{ jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik}) + (\% \text{ lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU}) + (\% \text{ drainase dalam kondisi baik})}{3}$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Persentase luasan Kawasan Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan lintas sektor urusan perumahan dan kawasan pemukiman berhasil mengurangi luasan kawasan kumuh sebagai implementasi program nasional universal access (100-0-100), dalam rangka mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{luas wilayah}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
11.	Meningkatnya sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang berkualitas, merata, manusiawi,	1. Persentase Sarana dan Prasarana sosial dan budaya yang representatif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program pembangunan menjaga keberlanjutan relasi sosial budaya masyarakat yang kondusif, mendukung pencapaian unsur visi maju dan berdaya saing

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
	berkeadilan dan berwawasan lingkungan	2. Persentase Sarana dan Prasarana kegiatan ekonomi yang representatif	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah sarana dan prasarana sosial dan budaya yang sudah dibangun memenuhi syarat representatif}}{\text{jumlah sarana dan prasarana sosial dan budaya yang ditargetkan sesuai rencana kebutuhan}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Surakarta • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Kebudayaan Kota Surakarta • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program pembangunan infrastruktur kota menghasilkan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi yang representatif, mendukung pencapaian unsur visi maju dan berdaya saing • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah sarana dan prasarana kegiatan ekonomi kreatif yang sudah dibangun memenuhi syarat representatif}}{\text{jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang ditargetkan sesuai rencana kebutuhan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan Representatif: Infrastruktur tertata dan terpelihara yaitu Kapasitas drainase sesuai kebutuhan, jalan terbangun rata, Penerangan jalan umum yang memenuhi standar, pedestrian terbangun dan berfungsi sesuai peruntukannya.</p>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data dan Perangkat Daerah Penanggungjawab)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta b. Dinas Perdagangan Kota Surakarta c. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta • Perangkat Daerah Penanggung jawab : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 38 TAHUN 2019
 TENTANG
 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DAN
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 - 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif
TUGAS	:	membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	1. Nilai evaluasi SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek konsistensi indikator kinerja dan capaian targetnya, untuk mendukung pencapaian unsir visi kota maju dan mencapai masyarakat sejahtera
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai Evaluasi SAKIP Kota Surakarta Tahun N-2
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	2. Nilai evaluasi LPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek konsistensi indikator kinerja dan capaian targetnya, untuk mendukung pencapaian unsir visi kota maju dan mencapai masyarakat sejahtera • Formulasi Pengukuran : LPPD dan EKPPD bernilai sangat tinggi Skor $3 < ST \leq 4$ mendapat skor prestasi Sangat Tinggi (ST) Skor $2 < T \leq 3$ mendapat skor prestasi Tinggi (T) Skor $1 < S \leq 2$ mendapat skor prestasi Sedang (S) Skor $0 < R \leq$ mendapat skor prestasi Rendah (R)

		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	3. Nilai Evaluasi RB	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk menilai kemajuan dan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik.
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai Evaluasi RB Kota Surakarta Tahun N-2
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan publik	Rata - rata nilai SKM	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dinilai memuaskan pengguna sehingga mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju dan berdaya saing
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah nilai survey kepuasan masyarakat PD Kota Surakarta yang melakukan survey}}{\text{jumlah PD Kota Surakarta yang melakukan survey}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

3. Tersusunnya produk hukum daerah sesuai ketentuan dan terpublikasikan	Persentase produk hukum daerah yang di undangkan sesuai dengan Propem dan Progsun	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Mengukur kinerja komitmen pemerintah menghasilkan payung hukum untuk isu prioritas sesuai tantangan khusus yang dihadapi daerah
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Produk hukum yang dihasilkan}}{\text{Produk hukum yang direncanakan sesuai propem dan progsun}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Bagian Hukum Sekretariat Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Sekretariat DPRD
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Lainnya kewenangan dukungan fungsi DPRD
TUGAS	:	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan legislasi dalam rangka menunjang kinerja DPRD	Persentase informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan berbasis teknologi informasi sesuai SOP yang berlaku (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas sosial lembaga wakil rakyat, mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju untuk kesejahteraan rakyat • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Realisasi Jenis informasi keluaran aktivitas DPRD yang dipublikasikan di Website}}{\text{Realisasi Jenis informasi keluaran aktivitas DPRD yang seharusnya (ditargetkan) dipublikasikan sesuai SOP}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Sekretariat DPRD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
2. Terwujudnya penetapan Perda sesuai dengan kebutuhan	Persentase PERDA yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas sosial lembaga wakil rakyat, mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju untuk kesejahteraan rakyat • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Total Realisasi Perda yang ditetapkan DPRD}}{\text{Total Raperda yang direncanakan}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Sekretariat DPRD
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Anggota DPRD	Nilai Kepuasan Anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD • Formulasi Pengukuran : IKM Pelayanan Sekretariat DPRD • Tipe Penghitungan : Hasil Survey • Sumber Data : Sekretariat DPRD

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Fungsi Penunjang Pengawasan
TUGAS	:	Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat pengendalian internal kinerja dan akuntabilitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju, berdayasaing, dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera • Formulasi Pengukuran : Hasil penilaian atas penyelenggaraan SPIP Kota Surakarta setiap tahun • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Inspektorat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	2. Opini WTP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui opini atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. • Formulasi Pengukuran : Hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan daerah terdiri atas: a. Wajar Tanpa Pengecualian b. Wajar Dengan Pengecualian c. Tidak Wajar d. Tidak Menyatakan Pendapat • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Inspektorat
2. Meningkatkan Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang profesional	Tingkat Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas tata kelola administrasi sumber daya keuangan publik, mendukung pencapaian unsur visi kota yang maju dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera • Formulasi Pengukuran : Berdasarkan Perka BPKP NO 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Inspektorat

3. Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah yang akuntabel	1. Presentase jumlah temuan/rekomendasi pengawasan APIP yang selesai di tindak lanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat persentase jumlah temuan/rekomendasi Hasil pengawasan APIP yaitu Irjen Kementerian, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah yang dapat selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan APIP}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Inspektorat
	2. Presentase jumlah temuan/rekomendasi pengawasan BPK RI yang selesai di tindak lanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase jumlah rekomendasi hasil temuan dari BPK RI yang selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK RI yang selesai ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan}}{\text{jumlah seluruh rekomendasi BPK RI}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Inspektorat

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pendidikan
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perumus kebijakan teknis bidang kependidikan; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependidikan; e. Pembinaan dan fasilitasi bidang kependidikan lingkup Pemerintah Kota Surakarta; f. Pelaksanaan tugas di bidang kependidikan; g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang; h. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; i. Pembinaan jabatan fungsional; j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya perluasan akses dan kualitas pendidikan masyarakat	1. APK : <ol style="list-style-type: none"> a. PAUD 3-6 tahun b. SD/MI/Paket A c. SMP/MTs/Paket B 	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang PAUD dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 3 – 6 tahun. b. Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang SD/MI/PAKET A dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun c. Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang SMP/MTS/Paket B dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : APK PAUD $\frac{\text{Jumlah siswa PAUD}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 3 – 6 tahun}} \times 100\%$ • Formulasi Pengukuran : APK SD/MI/Paket A jumlah siswa di jenjang SD/MI/Paket A $\frac{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$ • Formulasi Pengukuran : APK SMP/MTs/Paket B jumlah siswa di jenjang SMP/MTs / Paket B $\frac{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan
	<p>2. Angka Partisipasi Murni (APM), jenjang pendidikan :</p> <p>a. SD/MI/Pkt A</p> <p>b. SMP/MTs/Pkt B</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang SD/MI/Paket A yang berusia 7 – 12 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun. b. Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa jenjang SMP/MTs/Paket B yang berusia 13 – 15 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : APM SD/MI/Paket A jumlah siswa berusia 7-12 tahun yang duduk di jenjang SD/MI/Paket A $\frac{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$ • Formulasi Pengukuran : APM SMP/MTs/Paket B jumlah siswa berusia 13-15 tahun yang duduk di jenjang SMP/MTs/Paket B $\frac{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}{\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan
	<p>3. Angka Kelulusan (AL) :</p> <p>a. SD/MI</p> <p>b. SMP/MTs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa SD/MI yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa SD/MI yang mengikuti ujian b. Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi siswa SMP/MTs/ yang lulus ujian dibandingkan dengan siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian. • Formulasi Pengukuran : Angka kelulusan SD/MI $\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian}}{\text{Jumlah seluruh siswa SD/MI yang mengikuti ujian}} \times 100\%$ Angka kelulusan SLTP/MTs $\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian}}{\text{Jumlah seluruh siswa SMP/MTs yang mengikuti ujian}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	4. Jumlah prestasi pendidikan (siswa, guru, sekolah) tingkat regional/nasional / internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pendidikan • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui capaian prestasi di bidang pendidikan di jenjang PAUD/DIKDAS/DIKMAS selama 1 tahun, baik itu prestasi di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional. • Formulasi Pengukuran : Jumlah prestasi pendidikan jenjang PAUD/DIKDAS/DIKMAS yang dicapai dalam 1 tahun, baik itu di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pendidikan
2. Terwujudnya masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.	Cakupan layanan Pendidikan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui proporsi anggota masyarakat yang dilayani dalam Pendidikan Masyarakat (PNF) dibandingkan dengan penduduk usia 15 – 35 tahun • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah anggota masyarakat yang dilayani dalam Pendidikan Masyarakat}}{\text{Jumlah pemuda (usia 15 – 35 tahun)}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pendidikan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Kesehatan
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan pemberdayaan; d. Penyelenggaraan kesehatan keluarga dan gizi; e. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan; f. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular; g. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; h. Penyelenggaraan surveilans dan kejadian luar biasa (KLB); i. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar; j. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan; k. Penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; l. perencanaan, pendayagunaan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; m. pengawasan dan pengendalian kefarmasian, makanan, minuman, obat tradisional serta perbekalan kesehatan; n. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kesehatan; o. penyelenggaraan sosialisasi; p. pembinaan jabatan fungsional; dan q. pengelolaan UPT.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya keselamatan ibu dan anak, remaja, lanjut usia	1. Angka Kematian Ibu	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu (maternal) terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah kematian maternal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah kerja dalam satu tahun}} \times 100.000$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Kesehatan
	2. Angka Kematian Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan balita yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah kematian bayi dan balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah}} \times 1000$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
2. Meningkatkan status gizi masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator prevalensi stunting pada baduta digunakan untuk evaluasi kecukupan gizi makro (kalori dan protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia unggul bagi kota yang berdaya saing tinggi • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{anak baduta 0 - 23 bulan dengan status gizi pendek dan sangat pendek (TB/U atau PB/U < -2 SD)}}{\text{sasaran anak baduta 0 - 23 bulan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kesehatan
3. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatnya penyehatan lingkungan	1. Prevalensi HIV-AIDS pada populasi dewasa	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini digunakan untuk memberikan gambaran kerentanan kondisi masyarakat atas ancaman penyakit HIV-AIDS dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mendukung unsur visi menjadi kota yang maju dan berdaya saing dan masyarakat sejahtera • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{kasus HIV - AIDS pada usia 15 - 49 tahun yang ditemukan}}{\sum \text{penduduk usia 15 - 49 tahun}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Kesehatan
	2. Angka penemuan pasien (Case Notification Rate) / CNR	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit TB yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pasien TB (semua kasus) yang dilaporkan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100000$ • TipePerhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kesehatan
	3. Proporsi Kasus Penyakit Tidak Menular	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit tidak menular yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kasus baru hipertensi dan DM yang tercatat di puskesmas dan FKTP}}{\text{Jumlah kasus baru dan lama hipertensi dan DM yang tercatat di puskesmas dan FKTP}} \times 100\%$ • TipePerhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kesehatan
4. Meningkatnya perlindungan finansial	Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mendapatkan gambaran penduduk yang terlindungi oleh jaminan kesehatan nasional untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="850 568 1177 650">• Tipe Perhitungan : Kumulatif <li data-bbox="850 667 1145 750">• Sumber Data : Dinas Kesehatan

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TUGAS		:	Menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Pembinaan dan fasilitasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; e. Pelaksanaan tugas di bidang bina marga; f. Pelaksanaan tugas di bidang drainase; g. Pelaksanaan tugas di bidang cipta karya; h. Pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang; i. Pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pemanfaatan ruang j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum; k. Penyelenggaraan sosialisasi; l. Pembinaan jabatan fungsional; dan m. Pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	1. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas jaringan jalan dalam kondisi baik untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Persentase Panjang jembatan dalam Kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas jembatan untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{panjang jembatan seluruhnya}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3. Persentase panjang drainase/ saluran pembuangan air dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan kualitas drainase/saluran pembuangan air untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{panjang drainase/ saluran kota dalam kondisi baik}}{\text{panjang drainase/ saluran kota seluruhnya}} \times 100$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
2. Meningkatnya luasan daerah bebas banjir dan genangan	1. Persentase wilayah bebas banjir dan genangan	<p>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berhasil meningkatkan luasan wilayah bebas banjir untuk daya saing kota mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota</p> <p>• Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{luas wilayah bebas banjir dan genangan}}{\text{luas wilayah}} \times 100\%$ <p>• Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Persentase penambahan luasan ruang publik yang ditata	<p>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk memberikan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai regulasi mendukung pencapaian unsur visi maju dan sejahtera</p> <p>• Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{jumlah luas ruang publik yang ditata}}{\text{jumlah luas ruang publik keseluruhan}} \times 100\%$ <p>• Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
4. Tersedianya sarana prasarana umum di kawasan industri ekonomi kreatif	Persentase kluster ekonomi dengan prasarana umum kondisi baik	<p>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan infrastruktur kota menghasilkan prasarana kegiatan ekonomi yang <u>representatif</u>.</p> <p>Makna Representatif: Infrastruktur tertata dan terpelihara yaitu Kapasitas drainase sesuai kebutuhan, jalan terbangun rata, Penerangan jalan umum yang memenuhi standar, pedestrian terbangun dan berfungsi sesuai peruntukannya.</p> <p>• Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah kluster ekonomi kreatif yang tertata}}{\text{jumlah kluster ekonomi kreatif seluruh kota}} \times 100\%$</p> <p>• Tipe Penghitungan: Kumulatif</p> <p>• Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; d. Pembinaan dan fasilitasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; e. Pelaksanaan tugas di bidang perumahan; f. Pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman; g. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan; h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; i. Penyelenggaraan sosialisasi; j. Pembinaan jabatan fungsional; dan k. Pengelola UPTD.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan penanganan sengketa pertanahan	1. Persentase Penurunan RTLH	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman berhasil mengurangi proporsi rumah tak layak huni dalam rangka mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{(\text{Jumlah RTLH} - \text{RTLH yang ditangani})}{\text{jumlah RTLH yang ada}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	<p>2. Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)</p> <p>3. Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pemenuhan cakupan layanan sarana prasarana utilitas umum meningkatkan kualitas lingkungan sehat untuk mendukung pencapaian unsur visi kota sejahtera • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan urusan perumahan dan kawasan pemukiman berhasil memenuhi cakupan layanan ketersediaan air bersih sebagai implementasi program nasional universal access (100-0-100), dalam rangka mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	<p>4. Persentase rumah tangga bersanitasi</p> <p>5. Persentase asset (tanah) yang bersertifikat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pembangunan lintas sektor urusan perumahan dan kawasan permukiman berhasil meningkatkan cakupan rumah tangga bersanitasi sebagai implementasi program nasional universal access (100-0-100), dalam rangka mendukung pencapaian unsur visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah rumah tangga bersanitasi}}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan • Alasan Pemilihan Indikator : Untuk menertibkan kepemilikan surat hak atas tanah dan mengurangi sengketa pertanahan dalam rangka menertibkan administrasi dan meningkatkan PAD
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas lahan tidak bersertifikat}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Sosial
TUGAS	:	Menyelenggarakan kesejahteraan Sosial, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; d. Penyelenggaraan pengelolaan sumber dana bantuan sosial e. Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial f. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan non disabilitas; g. Penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial anak integratif; h. Penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluarga; i. Penyelenggaraan pendataan fakir miskin; j. Penyelenggaraan penanganan fakir miskin; k. Penyelenggaraan sosialisasi; l. Pembinaan jabatan fungsional; m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas dan kinerja penanganan permasalahan sosial	Persentase penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk menjawab Tugas Pokok dan Fungsi OPD, yaitu meningkatkan Kesejahteraan Sosial, meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (dalam UU tersebut dijabarkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar

		<p>dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya) Karena itu pemerintah wajib melakukan penanganan atas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani (tahun n)}}{\text{Jumlah total PMKS keseluruhan (tahun n)}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Dinas Sosial
<p>2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial sesuai dengan standar yang berlaku</p>	<p>Persentase melaksanakan pelayanan sosial PSKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk menjawab Tugas Pokok dan Fungsi OPD, yang mengakomodir salah satu kewenangan kota dalam Urusan Sosial sesuai UU No 23 Tahun 2014, yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota. Selain itu salah satu fungsi Dinas Sosial Kota Surakarta adalah untuk menyelenggarakan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial. Dengan penyelenggaraan fungsi pemberdayaan dan pembinaan tersebut, PSKS diharapkan mampu membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada PMKS yang ada. selain itu juga, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan sosial terhadap PSKS baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan • Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah PSKS yang melakukan pelayanan sosial (tahun n)}}{\text{Jumlah total PSKS keseluruhan (tahun n)}} \times 100\%$

		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan : Non kumulatif
<p>3. Meningkatnya penghormatan dan penghargaan terhadap nilai – nilai kepahlawanan</p>	<p>Persentase ketersediaan penghargaan terhadap nilai-nilai kepahlawanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data : Dinas Sosial
		<ul style="list-style-type: none"> • Alasan pemilihan indikator : Indikator ini dipilih untuk menjawab Tugas Pokok dan Fungsi OPD, yaitu menyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Diterjemahkan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan berupa fasilitasi kegiatan peringatan hari-hari besar nasional kepahlawanan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pelaksanaan penghargaan nilai – nilai kepahlawanan (tahun n)}}{\text{Jumlah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan (tahun n)}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Dinas Sosial

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan pengembangan komoditi industri; d. Penyelenggaraan peningkatan, produktivitas, sertifikasi dan inovasi industri; e. Penyelenggaraan Penempatan, Pelatihan tenaga kerja dan transmigrasi; f. Penyelenggaraan Hubungan Industrial, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial; g. Penyelenggaraan sosialisasi; h. Pembinaan jabatan fungsional; i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Menurunnya angka Pengangguran	Persentase Usia Produktif yang bekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengetahui angka pengangguran dari penduduk usia produktif yang bekerja. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Penduduk Usia Produktif yang bekerja}}{\sum \text{Penduduk Usia Produktif}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, BPS, Dispendukcapil
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja Pelayanan Dasar bidang ketenagakerjaan dalam kontribusinya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>menurunkan angka pengangguran untuk mendukung Kesejahteraan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Pencari Kerja yang ditempatkan th. n}}{\sum \text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar th. n}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3. Meningkatkan kesejahteraan Transmigran	Persentase Transmigran yang berhasil	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja Pemerintah menangani kelompok miskin atau warga Kota Surakarta yang perlu transmigrasi sebagai bukti upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Transmigran yang berhasil}}{\sum \text{Transmigrans yang ditempatkan}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4. Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis dan Berkeadilan	Persentase perselisihan hubungan kerja yang diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur Kinerja Disnakerperin dalam menangani kasus yang terdaftar di Dinas sehingga akan terselesaikan dan terwujudkan hubungan Industrial yang harmonis antara Pekerja dan Pengusaha.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{kasus yang diselesaikan dengan PB (th.n)}}{\sum \text{Kasus yang terdaftar (th.n)}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
5. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui peran sektor industri terhadap PDRB • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{PDRB Sektor Industri}}{\sum \text{PDRB Kota}}$ • Tipe penghitungan Non Kumulatif • Sumber Data Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6. Meningkatkan jumlah sentra Industri yang berkembang	Persentase sentra industri yang berkembang	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator Dengan berkembangnya sentra industri maka perkembangan industri semakin meningkat • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Sentra Industri yang berkembang}}{\sum \text{Jumlah Sentra Industri yang ada}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pemberdayaan Masyarakat
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan d. Pembinaan dan peningkatan perlindungan anak dan kualitas hidup anak e. Penyelenggaraan sosialisasi f. Pembinaan jabatan fungsional g. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan sarana prasarana h. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) PTPAS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kualitas hidup perempuan melalui Indeks Pembangunan Gender (Angka Harapan Hidup Perempuan, Angka lama sekolah perempuan dan pendapatan perkapita perempuan) • Formulasi Pengukuran : IPG • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	2. Partisipasi angkatan kerja perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kesetaraan dan keadilan akses memperoleh kesempatan partisipasi kerja di sektor publik • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah angkatan kerja perempuan}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS
	3. Tingkat Capaian KLA	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur capaian kab/kota layak anak adalah kategori hasil capaian • Formulasi Pengukuran : <ol style="list-style-type: none"> a. Pratama b. Madya c. Nindya d. Utama e. KLA • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kewilayahan	Persentase jumlah swadaya masyarakat terhadap total program pemberdayaan masyarakat kelurahan (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program – program pemberdayaan masyarakat, untuk mendukung pencapaian visi kota maju dan mandiri

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="890 468 1433 667">• Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah program swadaya masyarakat}}{\text{Jumlah program pemberdayaan masyarakat Kelurahan}} \times 100\%$ <li data-bbox="890 675 1433 812">• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif <li data-bbox="890 819 1433 974">• Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan Perikanan
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan dan kelautan perikanan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan; d. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; e. Penyusunan program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; f. Penataan prasarana pertanian; g. Penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; h. Pengawasan peredaran sarana pertanian; i. Pembinaan produksi di bidang pertanian; j. Pengendalian hama penyakit tanaman dan penyakit hewan; k. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; l. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian; m. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian; n. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan; o. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; p. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, didtribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; q. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan,

	<p>penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>r. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota;</p> <p>t. Pembinaan jabatan fungsional;</p> <p>u. Pengelolaan UPT RPH, UPT Puskesmas dan UPT AUP</p>
--	--

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Terjaganya ketersediaan pangan	1. Produksi padi (ton)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian di kota Surakarta dengan meningkatkan produksi padi untuk menyumbangkan pengaruh tingkat aman ketersediaan pangan bagi masyarakat, dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota • Formulasi Pengukuran : Jumlah Produksi padi tahun N • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2. Produksi hasil peternakan (ton)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian bidang peternakan di kota Surakarta untuk meningkatkan produksi hasil peternakan (daging, telur dan susu) dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah Produksi hasil peternakan tahun N *Produksi dalam hal ini adalah jumlah daging dari pematangan baik dari RPH maupun dari luar RPH serta jumlah susu dan telur yang dihasilkan di Kota Surakarta dalam satu tahun dengan satuan ton • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	3. Produksi budidaya ikan (ton)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kelautan dan perikanan di kota Surakarta untuk meningkatkan produksi ikan baik budidaya maupun tangkap dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Produksi ikan tahun N} - \text{Jumlah produksi ikan tahun N - 1}}{\text{Jumlah Produksi ikan N - 1}} \times 100\%$ Jumlah Produksi ikan tahun N *Produksi dalam hal ini adalah jumlah ikan hasil budidaya dan tangkap di Kota Surakarta dalam satu tahun dengan satuan ton • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	4. Peningkatan angka Konsumsi ikan (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kelautan dan perikanan di kota Surakarta untuk mengetahui peningkatan konsumsi ikan dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota. • Formulasi Pengukuran : AKI = A+B+C(kg/kapita/th) A= Konsumsi Ikan dalam Rumah Tangga berdasarkan SUSENAS B= 30% x A (konsumsi ikan di luar rumah tangga hotel restoran catering rumah sakit ponpes rumah makan kuliner dsb) C= 15 (%) x (A + B) (konsumsi ikan yang tidak tercatat pengolahan hasil perikanan) • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	5. Persentase ketersediaan pangan utama yang terjangkau (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (Kg)}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan Utama Penduduk pertahun}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
2. Terjaganya kesehatan hewan (keswan) dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)	1. Angka Morbiditas Hewan (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian di Kota Surakarta dengan menjaga status PHMS Z (penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis) yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan berdampak pada perekonomian dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota *Yang dimaksud hewan adalah semua hewan baik hewan ternak maupun hewan kesayangan • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah hewan sakit}}{\text{Jumlah hewan terancam}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	2. Rasio PPAH Layak konsumsi (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pertanian di kota Surakarta dengan meningkatkan kualitas/mutu produk pangan asal hewan (PPAH) yang dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi kesejahteraan kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="890 475 1299 508">• Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah PPAH yang aman sehat dan utuh}}{\text{Jumlah total PPAH di Kota Surakarta}} \times 100\%$ <li data-bbox="890 667 1230 750">• Tipe Penghitungan: Non Kumulatif <li data-bbox="890 775 1433 892">• Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		:	Urusan Lingkungan Hidup
TUGAS		:	Bidang lingkungan hidup
FUNGSI		:	<p>a. Penyelenggarakan kesekretariatan dinas;</p> <p>b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;</p> <p>c. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Ruang Terbuka Hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan pembangunan kapasitas lingkungan.</p> <p>d. Pembinaan jabatan fungsional; dan</p> <p>e. Pengelolaan UPT.</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, kualitas udara maupun tutupan lahan, dan mendukung pencapaian indikator sasaran RPJMD • Formulasi Pengukuran : $IKLH = (30\% \times IKA) + ((30\% \times IKU)(40\% \times IKTL)$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup
	2. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih karena mendukung pencapaian sasaran RPJMD, dan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan penegakan hukum dalam menjaga kualitas lingkungan hidup

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah perusahaan wajib AMDAL, UKL – UPL, SPPL yang telah diawasi}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL, UKL – UPL, SPPL}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi keberhasilan cakupan penanganan sampah dan mendukung pencapaian sasaran RPJMD</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{volume sampah yang ditangani}}{\text{volume produksi sampah}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih karena diamanatkan dalam Undang – Undang Penataan Ruang untuk penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%. Selain itu indikator ini juga mendukung pencapaian sasaran RPJMD</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{luas ruang terbuka hijau publik}}{\text{luas wilayah kota}} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
	3. Persentase penanganan sampah	
	4. Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Pengelolaan administrasi kependudukan d. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil e. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan f. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan g. Penyelenggaraan sosialisasi h. Pembinaan Jabatan fungsional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat	Persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai amanat permendagri Nomor 69 tahun 2012 bahwa Kabupaten/ kota menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, salah satu pelayanan bidang pemerintahan adalah pelayanan dokumen kependudukan • Formulasi Pengukuran : <p style="margin-left: 20px;">Jumlah % indikator kepemilikan KTP + % kepemilikan KK + % kepemilikan KIA + Cakupan kepemilikan akte kelahiran + Cakupan kepemilikan akte kematian + Cakupan pengakuan dan pengesahan anak + % pasangan nikah berakte nikah + cakupan penerbitan akte cerai</p> <p style="margin-left: 20px;">(8 Jenis Dokumen Kependudukan)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sesuai Amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik harus mengadakan survey kepuasan masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TUGAS	:	Tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pembangunan keluarga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan kualitas keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga e. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk f. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk g. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana h. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB dan Kader KB i. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi j. Pelaksanaan pelayanan KB k. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga l. Pembinaan jabatan fungsional; dan pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Terkendalinya jumlah penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	<p>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana berhasil menjaga laju pertumbuhan penduduk pada tingkat aman untuk mendukung pencapaian unsur visi kota sejahtera</p> <p>Formulasi Pengukuran :</p> $\ln \frac{\text{jumlah penduduk tahun N}}{\text{jumlah penduduk tahun N-1}} \times 100\%$ <p>• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>• Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</p>
	2. Cakupan Peserta KB Aktif	<p>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kondisi perencanaan keluarga dan kapasitas pelayanannya dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk mendukung peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat</p> <p>• Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{jumlah peserta program KB aktif (...)}}{\text{jumlah pasangan usia subur (...)}} \times 100\%$ <p>• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>• Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</p>

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Perhubungan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Urusan Perhubungan
TUGAS		:	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, angkutan dan teknis sarana dan prasarana.
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; d. pengaturan angkutan orang dan barang; e. pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel; f. penyelenggaraan uji kendaraan; g. penyelenggaraan sosialisasi; h. pembinaan jabatan fungsional; i. pengelolaan UPT.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya sistem management rekayasa lalu lintas, kesadaran tertib berlalu lintas dan prasarana lalu lintas yang memadai dan handal	Persentase kajian MRLL	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya mengendalikan manajemen rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas kota • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah kajian MRLL tahun N}}{\text{Total jumlah kajian MRLL pada tahun N}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Non kumulatif • Sumber Data : Dinas Perhubungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)	
(1)	(2)	(3)	
1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	1. Persentase operasional BST yang terlayani	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pemenuhan cakupan sarana transportasi publik untuk meningkatkan kualitas akses koneksi antar wilayah dan antar moda mendukung pencapaian unsur visi kota maju, berdaya saing dan sejahtera 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah koridor yang telah terlayani angkutan umum}}{\text{Jumlah koridor yang seharusnya}} \times 100\%$ 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Kumulatif 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Perhubungan 	
	2. Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.		<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya mengendalikan ketertiban kepemilikan kendaraan untuk mendukung kondusifitas kota
			<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota}}{\text{Total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Perhubungan 	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
2. Terwujudnya KBWU yang memenuhi persyaratan layak jalan akreditasi bengkel	Persentase kepemilikan uji KIR angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="884 475 1417 732">• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih sebagai upaya mengendalikan ketertiban kepemilikan kendaraan untuk mendukung kondusifitas kota <li data-bbox="884 732 1417 949">• Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang lulus KIR pada tahun N}}{\text{Jumlah angkutan umum pada tahun N}} \times 100\%$ <li data-bbox="884 949 1417 1056">• Tipe Perhitungan : Non Kumulatif <li data-bbox="884 1056 1417 1151">• Sumber Data : Dinas Perhubungan

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
TUGAS		:	Menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian
FUNGSI		:	Mengelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, mengelola e-goverment di lingkup pemerintah daerah, menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya pengelolaan keamanan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	1. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Agregat nilai pelaksanaan keamanan informasi terhadap fungsi tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi, teknologi serta penanggulangan dan pemulihan dengan menggunakan tools indeks KAMI yang di keluarkan oleh BSSN • Formulasi Pengukuran : Menggunakan Tool Indeks KAMI • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	2. Persentase PD yang melaksanakan integrasi aplikasi e-governance	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang smart (SMART CITY), mendukung pencapaian visi kota yang maju dan berdaya saing.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah OPD yang melaksanakan integrasi}}{\text{Jumlah OPD yang ada}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan berbasis data	Presentase ketersediaan data perencanaan sesuai standar kebutuhan layanan data	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan berbasis data • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah data sektoral per urusan yang dapat disediakan}}{\text{Jumlah urusan pemerintah daerah}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Koperasi dan UMKM
TUGAS		:	menyelenggaraan urusan pemerintah dibidang Koperasi dan usaha mikro kecil menengah
FUNGSI		:	<p>a. Penyelenggaraan penilaian kesehatan koperasi;</p> <p>b. Penyelenggaraan perizinan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan;</p> <p>c. Penyelenggaraan pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;</p> <p>d. Penyelenggaraan sosialisasi</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Persentase wirausaha baru	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program-program fasilitasi urusan UKM berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan bertumbuhnya wirausaha baru, untuk mendukung pencapaian unsur visi kota maju dan sejahtera • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah wirausaha baru}}{\text{jumlah calon wirausaha yang menerima diklat inkubator bisnis}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja KUMKM yang dibina	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UMKM dibandingkan dengan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>tahun sebelumnya sebagai tolok ukur kontribusi UMKM pada penurunan pengangguran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Naker KUMKM}_{(t)} - \text{Naker KUMKM}_{(t-1)}}{\text{Naker KUMKM}_{(t-1)}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	3. Persentase Koperasi Aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa persen koperasi yang aktif dalam mengadakan RAT dua tahun terakhir atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah koperasi aktif}}{\text{jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	4. Persentase Koperasi Sehat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan yang sehat pada koperasi simpan pinjam • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat}}{\text{jumlah koperasi simpan pinjam}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Pengukuran Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Penanaman Modal
TUGAS	:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan penanaman modal; d. pengelolaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Penyelenggaraan sosialisasi; e. Pembinaan jabatan fungsional. f. Pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya jumlah investasi	Persentase Rata-rata Pertumbuhan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektor di kota Surakarta berhasil menumbuhkan daya tarik bagi investor, sebagai pendukung pencapaian visi kota maju, mandiri dan sejahtera • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah investasi tahun N} - \text{jumlah investasi tahun N-1}}{\text{nilai investasi tahun N-1}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2. Terwujudnya pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal yang responsif dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan perijinan kategori baik	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja pelayanan perijinan, yaitu transparansi dan akuntabilitas pelayanan perijinan sejauh mana memberikan kepuasan pada pengguna,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>sebagai salah satu indikator daya saing kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formula Pengukuran : Angka hasil survey kepuasan pelanggan bernilai baik • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Urusan Kepemudaan dan Olah raga
TUGAS		:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI		:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan; d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan keolahragaan; e. Pembinaan dan fasilitasi bidang kepemudaan dan keolahragaan lingkup Pemerintah Kota Surakarta; f. Pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, olahraga, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya; i. Pembinaan jabatan fungsional; j. Pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Regional / Nasional / Internasional	Presentase Atlet Cabang Olahraga yang mempunyai prestasi tingkat regional / Nasional / Internasional (%)	<p>• Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih karena mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan menggambarkan kinerja pembangunan olahraga prestasi</p> <p>• Formulasi Pengukuran :</p> $\frac{\text{jumlah atlet cabang olahraga yang mempunyai prestasi di tingkat regional / nasional/internasional atau yang disetarakan.}}{\text{Jumlah atlet seluruh cabang olahraga Kota Surakarta yang dikirim mengikuti kompetisi}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
2. Meningkatnya prestasi dan kompetisi pemuda	Presentase pemuda / organisasi pemuda yang berprestasi di kancan Regional / Nasional / Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian prestasi pemuda sesuai dengan bidangnya • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pemuda/organisasi pemuda yang berprestasi di kancan regional/nasional/internasional}}{\text{Jumlah pemuda/organisasi pemuda yang dikirim mengikuti kompetisi di kancan Regional/Nasional/Internasional atau yang di setarakan}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		:	Urusan Kebudayaan
TUGAS		:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bahasa, sastra, kesenian, tradisi, sejarah dan diplomasi budaya serta permuseuman; d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian dan perlindungan warisan budaya, pengembangan SDM budaya, data dan dokumentasi; e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan, revitalisasi, perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya; f. Penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan supervisi; g. Pembinaan jabatan fungsional; h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya pelestarian nilai budaya, adat, tradisi masyarakat	1. Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini untuk mengukur komitmen pemerintah melestarikan kekayaan seni budaya, dengan melengkapi sarana pembangunan seni budaya daerah • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah grup seni budaya}}{10000 \text{ penduduk}}$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber data : Dinas Kebudayaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	2. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini untuk mengukur kinerja pelestarian kekayaan budaya daerah • Formulasi Pengukuran : Jumlah penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber data : Dinas Kebudayaan
2. Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan museum serta pengembangan sarana dan prasarana seni budaya daerah	1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program pembangunan menjaga keberlanjutan cagar budaya (benda, situs, struktur, bangunan, kawasan) yang dilestarikan mendukung pencapaian unsur visi maju dan berdaya saing. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total cagar budaya yang dimiliki daerah}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Dinas Kebudayaan
	2. Persentase Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program pembangunan memberikan prioritas pada dimensi kesejahteraan jiwa masyarakat dan kelestarian seni budaya, yang direpresentasikan dengan tersedianya sarana yang mendukung penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif guna pencapaian unsur visi maju dan sejahtera.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="890 475 1422 700">• Formulasi Pengukuran : Tempat yang dibangun/ dimanfaatkan sebagai sarana seni dan budaya $\frac{\text{Jumlah kelurahan}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100\%$ <li data-bbox="890 712 1422 849">• Tipe Penghitungan: Kumulatif <li data-bbox="890 862 1422 986">• Sumber Data : Dinas Kebudayaan

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		:	Urusan Wajib Perpustakaan Urusan Wajib Kearsipan
TUGAS		:	Menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan Menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan
FUNGSI		:	a. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan; b. Pelayanan perpustakaan; c. Penyelenggaraan pengelolaan arsip; d. Perlindungan dan penyelamatan arsip; e. Pengelolaan jaringan informasi arsip

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilih Indikator, Formasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan / Taman Cerdas (orang)	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih mengevaluasi pemanfaatan perpustakaan / taman cerdas dalam meningkatkan pengetahuan dan informasi
		<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Pengukuran : Pengunjung Perpustakaan Kota + Pengunjung perpustakaan kampung + Pengunjung Pojok Baca + Pengunjung Taman Cerdas
		<ul style="list-style-type: none"> Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> Sumber Data : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat penerapan ketertiban pengelolaan arsip dalam rangka mendukung implementasi e-government

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="890 480 1436 755"> <p>• Formasi Pengukuran :</p> <p>Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku</p> $\frac{\text{Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$ <li data-bbox="890 755 1436 854"> <p>• Tipe Penghitungan :</p> <p>Kumulatif</p> <li data-bbox="890 854 1436 1001"> <p>• Sumber Data :</p> <p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p>

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Pariwisata
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Pilihan
TUGAS		:	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan
FUNGSI		:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan c. Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum d. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif f. Pembinaan pelaku wisata g. Penyelenggaraan sosialisasi h. Pembinaan jabatan fungsional i. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Berkembangnya ekonomi kreatif dan kota tujuan wisata seni dan budaya	1. Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program-program pembangunan lintas sektor serta pembangunan pariwisata dan budaya pada khususnya di kota Surakarta berhasil menumbuhkan daya tarik bagi pelaku usaha dan masyarakat dari luar kota untuk melakukan kunjungan wisata atau aktivitas bisnis sebagai pendukung pencapaian visi kota budaya, maju, mandiri dan sejahtera

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah kunjungan wisatawan per tahun • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Pariwisata
	2. Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program – program pembangunan pariwisata dan budaya pada khususnya di kota Surakarta berhasil menumbuhkan roda perekonomian pada Surakarta sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta sebagai pendukung pencapaian visi kota budaya, maju, mandiri dan sejahtera • Formulasi Pengukuran $\frac{(\text{PAD sektor pariwisata th. N} - \text{PAD sektor pariwisata th N - 1})}{\text{PAD sektor pariwisata th N - 1}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan Kumulatif • Sumber Data Dinas Pariwisata
	3. Persentase perkembangan usaha ekonomi kreatif dari level <i>start up</i> ke level <i>overseas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program – program pembangunan lintas sektor serta pembangunan pariwisata dan budaya pada khususnya di kota Surakarta berhasil mengembangkan potensi usaha ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan dari level <i>start up</i> ke level <i>overseas</i> sebagai pendukung pencapaian visi kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>budaya, maju, mandiri, dan sejahtera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran $\frac{\text{Jumlah ekraf start up yang naik ke overseas}}{\text{Jumlah keseluruhan ekraf start up}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan Kumulatif • Sumber Data Dinas Pariwisata

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		:	Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Perdagangan
TUGAS		:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bina usaha dan tertib niaga, pendapatan, sarana dan prasarana perdagangan serta perlindungan pasar rakyat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; b. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan; c. penyelenggaraan dan pembinaan perdagangan; d. penyelenggaraan bina usaha dan tertib niaga; e. pengelolaan pendapatan; f. penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan; g. perlindungan pasar rakyat; h. Penyelenggaraan sosialisasi; i. Pembinaan jabatan fungsional; j. pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatkan kualitas pengawasan sarana distribusi perdagangan	Presentase pasar tradisional dan toko modern yang aman dari bahan berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk melindungi hak konsumen dan meningkatkan tanggungjawab pelaku usaha di pasar tradisional dan pasar modern dalam melakukan perdagangan barang dan jasa • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang ditemukan bahan berbahaya}}{\text{Jumlah pasar tradisional dan pasar modern}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Dinas Perdagangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
2. Tersedianya sarana prasarana ekonomi yang berdaya saing	1. Persentase Pasar Rakyat yang representatif	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat untuk mendukung daya tarik pasar tradisional
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah fisik pasar rakyat yang representatif}}{\text{jumlah pasar rakyat}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Perdagangan 	
	2. Persentase Pertumbuhan PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk meningkatkan penataan PKL beserta lokasinya
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah PKL yang telah tertata pada tahun N} - \text{Jumlah PKL yang tertata pada tahun N - 1}}{\text{Jumlah seluruh PKL yang tertata}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Perdagangan
3. Meningkatnya kegiatan ekspor produk dari Kota Surakarta	Nilai Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai Ekspor tahun N
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Dinas Perdagangan

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Dinas Pemadam Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		:	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
TUGAS		:	Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan c. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran d. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penyelamatan bahaya kebakaran e. Pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran f. Penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan g. Penyelenggaraan sosialisasi h. Pembinaan jabatan fungsional i. Pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya kecepatan dalam pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (response time rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) dari pangkalan Damkar	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini menggambarkan kecepatan dalam penanganan kebakaran • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap}}{\text{jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Normal • Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana, personil	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini menggambarkan luasan pelayanan bencana kebakaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
penanganan bencana kebakaran pada wilayah manajemen kebakaran		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="884 475 1433 692">• Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Potensi Kebakaran}} \times 100\%$ <li data-bbox="884 705 1433 799">• Tipe Penghitungan : Normal <li data-bbox="884 812 1433 892">• Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Satuan Polisi Pamong Praja
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
TUGAS		:	Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; d. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah; e. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; f. Penyelenggaraan sosialisasi; g. Pembinaan jabatan fungsional dan ; h. Pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketenteraman, keindahan) K3	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan mengendalikan pelanggaran terhadap ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah penyelesaian pelanggaran K3}}{\text{jumlah pelanggaran K3}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		:	Urusan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
TUGAS		:	untuk menyelenggarakan urusan penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
FUNGSI		:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, meliputi pendaftaran dan pendataan wajib pajak, perhitungan, penetapan dan angsuran pajak, pembukuan penerimaan pajak serta pendapatan lain, penagihan atas keterlambatan pajak, pendapatan lain dan restitusi. d. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; f. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah; g. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; h. Penyelenggaraan sosialisasi; i. Pembinaan jabatan fungsional; dan j. Pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan Akuntabel	1. Persentase Kenaikan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Rasio Kenaikan Realisasi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pajak Daerah Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Realisasi tahun berjalan} - \text{Realiasasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{APBD Kota Surakarta}} \times 100\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	3. Laporan Keuangan Daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP <p>Formulasi Pengukuran : Laporan keuangan daerah yang sesuai/tidak sesuai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4. Laporan Keuangan OPD yang sesuai standar akuntansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk rasio jumlah keuangan OPD yang sesuai dengan SAP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah laporan keuangan OPD sesuai SAP}}{\text{Jumlah laporan keuangan OPD keseluruhan}} \times 100\%$ • Tipe Pengukuran : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Terkelolanya dan pemberdayaan aset pemerintah kota secara optimal	1. Persentase Aset Yang Teregistrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk Laporan keuangan daerah yang sesuai SAP. • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Aset Teregistrasi}}{\text{Jumlah Aset Daerah Keseluruhan}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2. Persentase Aset OPD yang teregistrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana status hukum dari aset – aset yang dimiliki oleh pemerintah Surakarta khususnya untuk tanah dan bangunan • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah OPD yang aset nya tergistrasi}}{\text{Jumlah OPD keseluruhan}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN		:	Perencanaan
TUGAS		:	untuk menyelenggarakan urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah; d. Perencanaan bidang ekonomi; e. Perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan; f. Penyusunan dan pengelolaan data dan laporan; g. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; h. Penyelenggaraan sosialisasi; i. Pembinaan jabatan fungsional; dan j. Pengelolaan UPT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Berkembangnya ekonomi kreatif	Persentase Penerapan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauh mana penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) memberikan kontribusi bagi kemajuan pemerintah daerah, sebagai pendukung pencapaian visi kota maju dan sejahtera. Inovasi daerah yang dimaksud focus pada ekonomi kreatif • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah penerapan prototype inovasi}}{\text{jumlah prototype yang dihasilkan}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Meningkatnya kualitas kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi konsistensi antara sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah dengan jangka panjang dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah jangka panjang
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah sasaran RPJMD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah sasaran RPJPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 	
	2. Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi konsistensi antara program dalam dokumen perencanaan tahunan dengan jangka menengah dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah jangka menengah. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah program RKPD tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Mewujudkan masyarakat dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif dan berdaya saing	Cakupan serapan tenaga kerja terampil (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi SDM berdaya saing melalui program diklat tenaga terampil. • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja terampil yang di serap industri}}{\text{Jumlah peserta diklat mekanik dan GMF}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN	:	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
TUGAS	:	Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan otonomi daerah dan tugas pembantuan
FUNGSI	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; d. Pembinaan disiplin dan penilaian kinerja pegawai; e. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pegawai; f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; g. Pengelolaan pengembangan kompetensi pegawai; h. Penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; i. Fasilitasi lembaga profesi aparatur; j. Pembinaan jabatan fungsional.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Profesionalitas Kinerja Pegawai	1. Persentase aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat disiplin, integritas dan akuntabilitas aparatur • Formulasi Pengukuran : $\frac{\Sigma \text{ aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin (n)}}{\Sigma \text{ aparatur (n)}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	2. Persentase aparatur dengan nilai hasil capaian kinerja di atas 90	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kinerja aparatur • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{aparatur dengan nilai capaian kinerja di atas 90}}{\sum \text{seluruh aparatur}} \times 100\%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Semua OPD 1. CPNSD/PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	3. Persentase aparatur yang lulus diklat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui peningkatan kapasitas teknis tugas dan fungsi aparatur • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{aparatur yang lulus Diklat TF}}{\sum \text{aparatur yang mengikuti Diklat TF}} \times 100 \%$ • Tipe Perhitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem manajemen kepegawaian	1. Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensinya	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui peta penempatan PNS sesuai kompetensinya • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{aparatur menempati jabatan sesuai kompetensi}}{\sum \text{seluruh jabatan yang tersedia}} \times 100 \%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
	2. Tingkat akurasi dan validitas data informasi kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat keakuratan dan validitas data informasi kepegawaian • Formulasi Pengukuran : $\frac{\sum \text{Aparatur dengan data SIMPEG yang update}}{\sum \text{seluruh pegawai}} \times 100 \%$ • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kepuasan atas layanan kepegawaian. • Formulasi Pengukuran : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Kecamatan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
TUGAS		:	Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
FUNGSI		:	<p>(1) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; g. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan di pemerintahan Kelurahan <p>(2) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perijinan; b. Rekomendasi; c. Koordinasi; d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitas; g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; dan i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya kinerja pelayanan kecamatan yang berkualitas	1. Persentase pelayanan Kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah pelayanan yang tersertifikasi ISO 9001:2015 dalam rangka mewujudkan pelayanan prima yang tepat waktu, transparan dan profesional
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah layanan kecamatan yang bersertifikat ISO}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan di kecamatan}}$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Kecamatan
	2. Survey Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dari level kelurahan sampai dengan kecamatan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Rata – Rata nilai SKM Kecamatan dan Kelurahan
<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif 		
<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Kecamatan 		

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
TUGAS		:	<ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan kesekretariatan badan; b. kesiapsiagaan dan pencegahan bencana; c. kedaruratan dan logistik bila terjadi bencana; d. rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah; b. melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan; c. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat; d. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; e. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kesiapsiagaan sistem antisipasi risiko kebencanaan.	1. Presentase kelurahan tangguh bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan/penanganan bencana dengan dibentuknya kota tangguh bencana sehingga masyarakat siap menghadapi bila terjadi bencana.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk}}{\text{Kelurahan yang ada}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Presentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional penanganan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional penanggulangan /penanganan bencana • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah sarana dan prasarana penunjang operasional penanganan yang tersedia}}{\text{jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan minimal}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Presentase korban bencana bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Peningkatan pemenuhan kebutuhan bantuan sosial kepada masyarakat korban bencana selama masa tanggap darurat • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah masyarakat yang mendapat bantuan bencana}}{\text{jumlah kelompok sasaran yang ditargetkan}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah rawan bencana sesuai amanat pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana yang telah ada}}{\text{jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana yang seharusnya disusun}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NAMA DAERAH	PERANGKAT	:	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik
URUSAN YANG DILAKSANAKAN	PEMERINTAHAN	:	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
TUGAS		:	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat
FUNGSI		:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan kesekretariatan kantor; b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; c. Pembinaan hubungan antar lembaga dan politik dalam negeri; d. Pembinaan kesatuan dan ketahanan bangsa; e. Pembinaan umum; f. Penyelenggaraan sosialisasi; g. Pembinaan jabatan fungsional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
1. Terciptanya kohesi sosial masyarakat.	1. Persentase Ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat Kota Surakarta . • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah ormas, LSM dan OKP yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan}}{\text{jumlah total ormas, LSM dan OKP di Kota Surakarta}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Persentase penurunan konflik SARA	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan di kota Surakarta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penurunan konflik sara yang terselesaikan}}{\text{Jumlah penurunan konflik sara yang terjadi}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif • Sumber Data : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	3. Persentase Rumah Ibadah Yang Ber IMB.	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Antisipasi konflik sosial inter umat beragama dan antar umat beragama • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah rumah ibadah ber-IMB}}{\text{jumlah rumah ibadah}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan: Kumulatif • Sumber Data : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO